

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 merupakan teori yang mendasari hubungan antara pemilik atau pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai :

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa teori keagenan menunjukkan bahwa ada hubungan antara *principal* dan *agent*. Dimana *principal* merupakan para pemegang saham atau investor yang bertindak untuk mengevaluasi informasi-informasi yang ada di perusahaan. Selain itu, *principal* juga mempunyai kontribusi kepada perusahaan dengan memberikan dana sebagai modal untuk kegiatan operasional perusahaan. *Agent* adalah pihak-pihak yang mengelola perusahaan yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Salah satu elemen kunci teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah bahwa *principal* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda dikarenakan semua individu bertindak atas kepentingan individu itu sendiri (*self interest*). *Agent* dapat bertindak tidak sesuai dengan keinginan

principal karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dan berpotensi menimbulkan konflik. Kondisi inilah yang disebut dengan *agency problem* (masalah keagenan). Masalah ini timbul akibat perbedaan tujuan dan kepentingan antara *principal* dan *agent* karena adanya ketidaktahuan *principal* akan tindakan yang dilakukan *agent*. Manajemen (*agent*) atau pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan dana harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambilnya kepada pemilik atau *principal*. Antara *principal* dan manajer mempunyai tujuan yang berbeda, *principal* lebih mementingkan keuntungan pribadi sedangkan manajer lebih mementingkan kesejahteraan sendiri. Perbedaan persepsi inilah yang akan menimbulkan *asymmetry information* antara pihak *principal* dan *agent* (Eisenhardt, 1989).

Hikmah dan Rahmayanti (2011) mengatakan bahwa *agency theory* mempunyai hubungan yang erat dengan luas pengungkapan khususnya pada perusahaan perbankan karena, menurut teori tersebut adanya perbedaan informasi (*asymmetry information*) antara pihak *principal* dan *agent* dapat diminimalisasi melalui pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perbankan. *Agency theory* juga berhubungan dengan ukuran suatu perusahaan karena pada umumnya perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang kompleks dan sumber daya yang banyak sehingga memiliki *agency cost* yang tinggi. Perusahaan akan lebih banyak melakukan pengungkapan untuk mengurangi *agency cost* tersebut. Selain itu, pemilik perusahaan (*principal*) cenderung menuntut manajemen (*agent*) untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Tingginya tingkat profitabilitas

menunjukkan bahwa pengawasan berjalan dengan baik sehingga manajemen cenderung mengungkapkan informasi yang banyak untuk mendukung kinerja mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

2. Teori Signal (*Signaling Theory*)

Signaling theory menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal perusahaan (Butarbutar, 2011). Informasi merupakan unsur penting bagi pihak eksternal dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap dan relevan sangat diperlukan oleh investor sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Teori Signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Nuswandari (2009) menyatakan bahwa dorongan tersebut terjadi karena terdapat asimetri informasi (*asymmetry information*) antara perusahaan dengan pihak eksternal. Perusahaan memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Kemungkinan lain, pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki

kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Sebaliknya akan menguntungkan bagi perusahaan yang kondisinya buruk karena pihak eksternal menilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi asimetri informasi tersebut. Perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pihak eksternal yang berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang.

Nuswandari (2009) lebih lanjut berpendapat bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung dapat menjadi sinyal yang dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Dengan pengungkapan informasi yang lebih luas dapat memberikan sinyal yang lebih banyak kepada publik mengenai kondisi perusahaan.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) menurut Kamus Besar Akuntansi adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran atau pelengkap bagi laporan

keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan (suplemen). Informasi ini memberikan suatu *elaborasi* atau penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan (Andriyanto & Metalia, 2011). Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa apabila pengungkapan dikaitkan dengan laporan keuangan maka pengungkapan merupakan informasi dan penjelasan mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha di dalam laporan keuangan tersebut sehingga informasi yang diungkapkan harus detail, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kegiatan-kegiatan unit usaha tersebut.

Menurut Prasetya (2011), ada tiga konsep pengungkapan (*disclosure*) yang umumnya digunakan, yaitu :

a. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) minimal harus ada, dalam artian informasi dalam laporan keuangan tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan tersebut.

b. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) harus tersirat tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan.

c. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

Penyajian dalam mengungkapkan laporan keuangan harus relevan. Laporan keuangan harus diungkapkan secara lengkap, akan tetapi sering menimbulkan kesan bahwa pengungkapan penuh diungkapkan sehingga terlalu melimpah dan terlalu banyak sehingga membuat beberapa pihak menganggapnya kurang baik karena akan menimbulkan kemungkinan terjadinya keaburan informasi laporan keuangan sehingga sulit untuk ditafsirkan (Indriani dkk., 2014)

Pengungkapan merupakan suatu hal yang penting bagi pihak yang membutuhkan, selain itu pengungkapan (*disclosure*) juga bersifat informatif sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemakai informasi untuk mencapai tujuannya (Suripto, 1999). Secara sederhana, pengungkapan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan manfaat bagi pemakai informasi serta untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Menurut Widiastuti (2004), pengungkapan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur berdasarkan peraturan pasar modal disuatu negara, dalam hal ini yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam menyampaikan informasi dengan pertimbangan

tertentu sehingga menyebabkan keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan. Menurut Al Akra *et al.*, (2010), tujuan dilakukannya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) karena adanya kebutuhan informasi bagi pengguna laporan yang harus segera dipenuhi, selain itu juga untuk memberikan gambaran mengenai kesehatan perusahaan sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan mengenai suatu bisnis. Peraturan mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia telah diatur oleh BAPEPAM-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan (Gunawan dan Hendrawati, 2016).

4. Struktur Kepemilikan Bank

Keberhasilan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan keuntungan dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Disamping besarnya peran manajemen dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik perusahaan itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Pemilik suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin (Hadad dkk., 2003). Di dalam hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen selalu ada *performance contract* dimana pemilik perusahaan memberikan syarat kepada manajemen yang dipilih untuk memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan pemilik perusahaan tersebut (Indrayani, 2009).

Seringkali perusahaan memilih untuk mendapatkan dana dengan cara menjual saham perusahaannya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan perusahaan muncul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut. Seringkali perbedaan proporsi saham yang dimiliki investor dalam suatu perusahaan mempengaruhi tingkat kelengkapan dalam mengungkapkan informasi perusahaan (Maharani dan Budiasih, 2016). Bank merupakan perusahaan yang juga memiliki struktur kepemilikan seperti perusahaan lainnya. Hubungan antara pemilik dengan manajemen pada suatu bank memiliki peran tersendiri bagi bank tersebut mengingat adanya keberagaman jenis dan latar belakangnya. Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi bank milik pemerintah dan bank milik swasta.

Bank pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Karina (2013) mengatakan bahwa bank dapat dimiliki pemerintah karena pemerintah sendirilah yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan direktur perusahaan maupun mengambil kebijakan yang dilakukan oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah dan agar bank tersebut mampu bertahan maka bank itu harus mampu menyelaraskan dengan pemerintah, akan tetapi hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan manajemen bank. Pemerintah mempunyai

kekayaan tersendiri yang nantinya akan menguntungkan perusahaan yang mempunyai proporsi saham pemerintah yang mana keuntungan tersebut dapat berupa kemudahan dalam mendapatkan modal, kredit maupun likuidasi (Widiana, 2012). Bank milik pemerintah ini mencakup BUMN maupun non BUMN. Karina (2013) menambahkan bahwa perusahaan bisa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan adalah pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan bank milik swasta merupakan bank umum yang modalnya dimiliki oleh perseorangan, baik itu swasta nasional maupun swasta asing. Bank swasta nasional adalah bank-bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha nasional Indonesia atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Berbeda dengan bank swasta nasional, bank dengan kepemilikan swasta asing ini seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan membuka cabang yang berpusat di luar negeri (membuka kantor di Indonesia), yang kegiatan operasinya diatur dengan ketentuan sendiri. kepemilikan asing cenderung akan menimbulkan masalah asimetri informasi yang diakibatkan adanya hambatan geografis dan bahasa, serta standar yang digunakan di setiap negara berbeda. Untuk mengurangi masalah tersebut perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan terdorong untuk melakukan pengungkapan informasinya secara lebih luas.

Selain itu, Susanto (1992) dalam Tamba (2011) mengemukakan bahwa ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang lebih luas, sebagai berikut:

- a. Kemungkinan permintaan yang lebih besar dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
- b. Perusahaan mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal.
- c. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi.

Hadirnya bank asing akan meningkatkan persaingan pada sektor perbankan. Namun, dengan keberadaan bank asing juga akan memberikan manfaat pada bank-bank domestik. Menurut Crystal *et al.* (2001) dalam Sabrina (2014), meningkatnya perdagangan internasional pada pasar keuangan dunia membuat perusahaan pada sektor perbankan memperluas jaringan dengan membuka cabang diberbagai negara lain, hal tersebut didasari pada alasan bahwa :

- a. Kehadiran bank asing dipercaya dapat mendukung liberalisasi permodalan bank dan mampu meningkatkan ketersediaan dana untuk proyek-proyek investasi dalam negeri memfasilitasi arus modal masuk.
- b. Kepemilikan asing diharapkan dapat meningkatkan kualitas bank, adanya peningkatan pelayanan perbankan dan mampu menciptakan persaingan yang sehat dengan bank domestik.

- c. Bank asing diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem perbankan, seperti akuntabilitas dan transparansi, perbaikan regulasi keuangan, dan lain-lain.

Hal tersebut akan mendorong bank-bank swasta nasional untuk terus mengembangkan produk, kinerja maupun pelayanannya kepada masyarakat agar terus bertahan dalam persaingan bisnis.

5. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai perusahaan, dan membedakannya dengan perusahaan yang lain. Subiyantoro (1996) dalam Ruwita (2012) mengemukakan bahwa dalam konteks laporan keuangan, penentuan karakteristik perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan tiga kategori, yaitu: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (*structure*), kinerja (*performance*), dan pasar (*market*). Struktur meliputi ukuran (*size*) perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau *leverage*. Kemudian kinerja mencakup kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan (likuiditas perusahaan) dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas perusahaan). Selanjutnya karakteristik yang berhubungan dengan pasar, ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kualitatif, misalnya tipe industri dan tipe auditor.

Karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Laraswita & Indrayani (2010) dalam Pelamonia (2015), pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Mutu dan luas pengungkapan laporan tahunan masing-masing perusahaan berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan juga berbeda. Karakteristik perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk memperoleh keuntungan. Selain itu profitabilitas juga menjadi ukuran baik buruknya kinerja keuangan bagi perusahaan (Maharani dan Budiasih, 2016). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung disukai oleh para investor karena dengan profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih detail sehingga diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada investor.

Setiap perusahaan pada umumnya selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Menurut Karuniasari (2013) perusahaan dengan laba yang

tinggi akan memiliki cukup dana untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah informasi menjadi lebih bermanfaat sehingga dapat menyajikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Profitabilitas kaitannya dengan pengungkapan informasi keuangan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori *signaling* dimana pengungkapan digunakan oleh para manajer perusahaan yang *profitable* untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para investor guna mendukung keberlanjutan kegiatan perusahaan (Malone *et al.*, 1993 dalam Dibiyanoro, 2011). Perusahaan yang *profitable* cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan karena pihak manajemen ingin meyakinkan para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal bahwa perusahaan ada pada persaingan yang kuat dan memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan bagus (Maharani dan Budiasih, 2016).

Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan dengan perbandingan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan mempermudah perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan lain, karena perusahaan besar akan lebih dikenal publik dan mudah dalam memasuki pasar. Selain itu, pada umumnya perusahaan besar memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk

yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan yang luas.

Ukuran perusahaan dipandang penting karena besarnya ukuran suatu perusahaan, maka daya jual perusahaan tersebut akan lebih baik. Para *stakeholder* akan menganggap perusahaan besar akan lebih tahan dari badai finansial (Maharani & Budiasih, 2016). Perusahaan yang besar memiliki potensi untuk mengungkapkan lebih luas dan lebih lengkap informasi daripada perusahaan yang berskala kecil. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar memiliki *agency cost* yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. *Agency cost* sendiri merupakan biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham. Maka dari itu, untuk mengurangi *agency cost* tersebut perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi atau akan melakukan pengungkapan yang lebih luas lagi.

Dalam penelitian Butarbutar (2011), terdapat beberapa argumentasi yang mendasari hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem

informasi pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting untuk mengurangi kelemahan perusahaan tersebut dalam persaingan bisnis.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Kepemilikan Pemerintah dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yaitu perusahaan yang akte pendiriannya maupun modal perusahaan tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Menurut Widiana (2012), perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat karena masyarakat memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan dengan kepemilikan pemerintah. Bagi masyarakat, pengelolaan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis. Sorotan dan perhatian dari masyarakat yang besar tersebut membuat manajemen terdorong untuk melakukan lebih banyak pengungkapan. Zulfi (2014) menambahkan adanya intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan juga dapat memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat, selain itu juga pemerintahlah yang menjadi regulator didalam perusahaan tersebut sehingga pemerintah

mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan sehingga mematuhi peraturan pemerintah.

Alasan lain yaitu perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi cenderung dipengaruhi oleh intervensi politik yang seringkali tidak konsisten yang menimbulkan *agency conflict* yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain (Heryanto, 2012). Untuk mengurangi *agency conflict* tersebut, perusahaan perlu melakukan pengungkapan yang lebih detail dan transparan.

Widiana (2012) meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diprosikan dengan variabel kepemilikan pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Kusumawati (2013) juga meneliti mengenai struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan di dalam laporan tahunan yang diprosikan dengan kepemilikan pemerintah. Selain itu penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 serta masuk dalam kriteria penilaian PROPER periode 2008-2009, 2009-2010 dan 2010-2011. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Kepemilikan Asing dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Perusahaan dengan kepemilikan asing yaitu perusahaan yang proporsi kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum, atau pemerintah yang berasal dari investor asing atau berstatus luar negeri (Widiana, 2012). Bank asing di Indonesia hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari menteri keuangan dengan mengacu kepada pertimbangan bank sentral (Sabrina, 2014). Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki teknologi yang canggih, *skill* karyawan yang baik, maupun jaringan yang luas yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan pengungkapan secara luas (Tamba, 2011).

Dengan hadirnya bank asing ini otomatis akan meningkatkan persaingan pada sektor perbankan. Namun, dengan keberadaan bank asing juga memberikan manfaat pada bank-bank domestik. Hermes dan Lensink (2004) dalam Heryanto (2012) menyebutkan adanya bank swasta asing akan menstimulasi bank-bank domestik untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan serta memperbaiki kualitas pelayanan untuk mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki, selanjutnya keberadaan bank asing ini akan

memberikan efek positif terhadap bank-bank domestik karena bank-bank asing ini dapat memperkenalkan layanan keuangan yang baru yang dapat mendorong bank domestik untuk mengembangkan layanan baru untuk bersaing dengan produk bank asing. Selain itu, dengan adanya bank asing dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bank domestik dengan melakukan alih pengetahuan dan wawasan karyawan asing terhadap karyawan domestik.

Menurut Xiao *et al.*, (2004) dalam Tamba (2011), perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan adanya hambatan geografis dan bahasa. Oleh sebab itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar lebih banyak melakukan pengungkapan untuk mengurangi masalah asimetri informasi yang dihadapi. Selain itu, umumnya perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi merupakan perusahaan besar yang juga memiliki reputasi yang besar pula di dalam dunia bisnis. Hal tersebut mendorong manajemen dalam perusahaan tersebut untuk selalu memberikan sinyal positif mengenai kesehatan perusahaan melalui pengungkapan yang lebih luas dimana selain untuk menjaga reputasinya, dengan memberikan sinyal-sinyal tersebut maka juga akan menarik minat para investor dalam menanamkan dananya untuk perusahaan.

Tamba (2011) meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diprosikan

dengan variabel kepemilikan asing dan menggunakan sampel perusahaan *Manufacturing Secondary Sectors* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai efek positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Prayoga dan Almia (2013) juga meneliti mengenai pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap pengungkapan manajemen resiko dan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusi asing mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen resiko. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

3. Profitabilitas dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba yang didapat. Kemampuan perusahaan untuk mencapai laba secara maksimal sering disebut dengan istilah profitabilitas. Besar kecilnya nilai profitabilitas yang didapat oleh suatu perusahaan, dapat menjadi ukuran bagi kesehatan perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan

manajemen dalam perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan merasa bangga dengan kinerja yang dicapainya sehingga akan mendorong manajemen melakukan pengungkapan lebih banyak untuk memberi kesan positif kepada para investor dan pemegang saham (Prasetya, 2011). Selain itu apabila didasarkan pada tujuan untuk menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memberikan lebih banyak sinyal-sinyal positif melalui pengungkapan yang lebih detail lagi dengan tujuan untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan tersebut berada pada persaingan yang kuat dan dalam kondisi yang baik. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin banyak pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Widati dan Wigati (2011) meneliti tentang pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan yang diukur dengan *operating return on asset* dan menggunakan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan. Shehata *et al.*, (2014) juga meneliti tentang karakteristik perusahaan terhadap tingkat *mandatory disclosure* yang diproksikan dengan variabel profitabilitas dan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di *Egyptian Accounting Standards (EAS)* periode 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *mandatory disclosure* di perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012), Maharani & Budiasih

(2016) dan Pelamonia (2015) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

4. Ukuran Perusahaan dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan dengan perbandingan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan mempermudah perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan lain, karena perusahaan besar akan lebih dikenal oleh publik dan mempunyai kemudahan dalam memasuki pasar. Selain itu, biasanya perusahaan besar memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan yang lebih luas.

Menurut teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), perusahaan yang besar memiliki biaya keagenan (*agency cost*) yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Biaya keagenan (*agency cost*) merupakan biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham. Oleh sebab itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi biaya

keagenannya, dan untuk mengurangi biaya keagenan tersebut maka perusahaan harus meningkatkan pengungkapannya. Selain itu, perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum, sehingga perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil (Trimuharmi, 2010). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lain adalah perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan. Lebih banyak pemegang saham, berarti memerlukan lebih banyak juga pengungkapan, hal ini dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan para analis pasar modal (Gunawan, 2000 dalam Purnasiwi, 2011).

Pelamonia (2015) meneliti tentang karakteristik perusahaan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang diprosikan dengan variabel ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Purnasiwi (2011) juga meneliti mengenai ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 dengan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

C. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, maka model penelitian ini disajikan sebagai berikut:

